BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda-beda di setiap literatur sesuai dengan jumlah instansi atau lembaga serta wilayah yurisdiksinya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:²⁶

a. Usaha Mikro

Usaha produktif milik perseorangan dan / atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

b. Usaha Kecil

Perusahaan ekonomi produktif mandiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau perusahaan cabang yang memiliki, memeriksa, atau sebagai bagian dari, baik langsung maupun tidak langsung, usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil seperti yang bekerja dalam hukum ini.

c. Usaha Menengah

Perusahaan produktif ekonomi mandiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

²⁶ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha kecil* (Bandung: Alfabeta, 2012), 268

perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau sebagian, baik langsung maupun tidak langsung, dengan kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kriteria UMKM sebagaimana dijelaskan dalam pasal Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp.50.000.000,- atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000
- b. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp.50.000.000.- dan Rp.500.000.000.- atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp.300.000.000.- dan Rp.2.500.000.000.-
- c. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp.500.000.000.- dan Rp 10.000.000.000.- atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp.2.500.000.000.- dan Rp.50.000.000.000.

B. Laporan Keuangan

1. Definisi Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK No. 1 Tahun 2015, "Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas". Laporan keuangan merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam memberikan informasi mengenai perkembangan perusahaan,

²⁷ Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 2.

dapat juga digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang, dan pada waktu yang akan datang. Menurut Rochman & Pawenary Laporan keuangan umumnya disajikan untuk memberikan informasi mengenai posisi-posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu perusahaan dalam periode tertentu. Informasi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan.²⁸

Munawir mendefinisikan laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menggambarkan jumlah asset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.²⁹

Dari beberapa pengertian yang dipaparkan di atas maka dapat diambil kesimpulan laporan keuangan adalah hasil akhir dari keseluruhan siklus akuntansi yang tersaji secara sistematis, logis, dan terstruktur yang dapat digunakan sebagai acuan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut kasmir Tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:³⁰

- a. Memberikan suatu informasi perihal jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini.

²⁸ Astuti, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 5.

²⁹ Tutik Siswanti et al, *Pengantar Akuntansi* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), 29.

³⁰ *Ibid.*, 30.

- b. Memberikan informasi perihal jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini.
- c. Memberikan informasi perihal jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi perihal jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- e. Memberikan informasi perihal perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi perihal kinerja manajemen perusahaan dalam periode akuntansi.
- g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

3. Sifat Laporan Keuangan

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran kemajuan (*progress report*) secara periodik yang dilakukan oleh pihak management yang bersangkutan. Laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari kombinasi antara:³¹

- a. Fakta-fakta yang telah dicatat (*recorder fact*)

Laporan keuangan dibuat berdasarkan fakta dari catatan akuntansi, pencatatan dari pos- pos ini merupakan catatan historis dari peristiwa yang telah terjadi dimasa lampau dan jumlah uang yang tercatat dinyatakan dalam harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Dengan sifat yang demikian maka laporan keuangan tidak dapat

³¹ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty Offset, 2014), 120.

mencerminkan posisi keuangan dari suatu perusahaan dalam kondisi perekonomian paling akhir.

b. Prinsip dan kebiasaan di dalam akuntansi

Data yang dicatat didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim.

c. Pendapat pribadi

Dimaksudkan bahwa walaupun pencatatan akuntansi telah diatur oleh dalil-dalil dasar yang telah ditetapkan yang sudah menjadi standar praktek pembukuan, namun penggunaan tersebut tergantung oleh akuntan atau pihak management perusahaan yang bersangkutan misalnya dalam menentukan nilai persediaan itu tergantung pendapat pribadi manajemen serta berdasar pengalaman masa lalu.

4. Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dibuat oleh perentitasan terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut. Masing-masing laporan keuangan memiliki arti sendiri dalam melihat kondisi keuangan perentitasan, baik secara bagian, maupun secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya perentitasan dituntut untuk menyusun beberapa jenis laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, terutama untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

Penyusunan laporan keuangan terkadang disesuaikan juga dengan kondisi perubahan kebutuhan perentitasan. artinya jika tidak ada perubahan

dalam laporan tersebut, tidak perlu dibuat sebagai contoh laporan perubahan modal atau laporan catatan atas laporan keuangan. Atau dapat pula laporan keuangan dibuat hanya sekedar tambahan, untuk memperkuat laporan yang sudah dibuat.

Menurut Kasmir dalam praktiknya secara umum laporan keuangan yang disusun yaitu:³²

a. Neraca

Neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Aktiva yang dibagi kedalam tiga jenis yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lainya. Kewajiban dibagi kedalam dua jenis yaitu kewajiban lancar yang biasa disebut dengan utang berjangka pendek dan utang berjangka panjang. Modal, komponen modal terdiri dari modal disetor dan laba yang ditahan lainnya.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang nantinya akan menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang telah didapat serta juga biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan laba rugi dalam suatu periode tertentu.

³² Aldila Septiana, *Analisis Laporan Keuangan (Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan)*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), 15.

c. Laporan Perubahan Modal

Dalam menjalankan operasional perusahaan, tentunya modal yang ditanam akan mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena modal harus digunakan dalam menjalankan roda perusahaan, adanya penambahan dari laba yang didapat, penggunaan modal untuk kepentingan pemilik perusahaan. Laporan perubahan modal (*capital statement*) dalam istilah akuntansi merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan dalam periode tertentu. Laporan perubahan modal ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi.

d. Laporan Arus Kas

Jenis laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di perusahaan (kas masuk atau kas keluar). Laporan arus kas atau *cash flow* ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar. Laporan mengenai arus kas masuk data dilihat dari beberapa sumber, yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman. Sedangkan arus kas keluar dapat dilihat dari beberapa banyak beban biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk kegiatan operasional atau investasi pada bisnis lain.

e. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan ini merupakan laporan yang memberikan informasi apabila terdapat laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

C. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

1. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan SAK EMKM ditujukan untuk UMKM agar dapat memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku. Pengguna SAK EMKM yaitu yang telah memenuhi karakteristik seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bab IV pasal 6. Apabila entitas telah menerapkan seluruh persyaratan terhadap SAK EMKM maka membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan.

SAK EMKM adalah Standar Akuntansi Keuangan Ekonomi Mikro Kecil Menengah, yaitu untuk entitas yang laporan keuangannya tidak dipublikasikan sehingga diketahui secara luas oleh publik, dimana SAK EMKM diterapkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) di dalam SAK EMKM, bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah adalah.³³

³³ Mortigor Afrizal Purba, "Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM di Kota Batam", *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3 (2), 2019, 57.

- a. Unit usaha atau entitas yang tidak memerlukan akuntabilitas publik secara signifikan.
- b. Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan yang umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna di luar perusahaan. Pengguna eksternal adalah stakeholder yang tidak terlibat langsung dalam mengelola kegiatan usaha, pemberi kredit, dan lembaga lainnya, misalnya : pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

- a. Telah menyerahkan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses mengajukan pernyataan pendaftaran, kepada otoritas pasar modal atau regulator lainnya untuk tujuan penerbitan sekuritas di pasar modal.
- b. Menguasai *asset* dan kapasitas *fidusia* untuk sekelompok orang, seperti bank, perusahaan asuransi, broker dan atau pedagang sekuritas, dana pensiun, reksadana dan bank inventasi.

2. Manfaat dan Tujuan SAK EMKM

SAK EMKM dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip *going concern* yakni menginginkan usahanya terus berkembang.³⁴ Untuk mengembangkan usaha perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan

³⁴ Ni Luh Putu Widhiastuti & Putu Diah Kumalasari, "Opini Audit Going Concern dan Faktor-Faktor Penyebabnya", *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 5 (1), 2022, 122.

menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai kemudahan, misalnya: untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang dapat memperoleh pinjaman dana dari pihak ketiga, dan sebagainya.

SAK EMKM ini disusun cukup sederhana sehingga tidak akan menyulitkan bagi penggunaannya yang merupakan perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah. sebagaimana kepanjangan yang telah diuraikan di atas merupakan unit kegiatan yang melakukan aktifitas tetapi sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata lain unit usaha yang dimiliki oleh orang perorang atau sekelompok orang, dimana kegiatan dan modalnya masih terbatas.

D. Komponen dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

1. Asumsi Dasar Laporan Keuangan SAK EMKM

a. Dasar Akrua

Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrua. Pos-pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing pos-pos tersebut.³⁵

³⁵ Hedy Desiree Rumambi et all, *Penyusunan Laporan Keuangan UMKM* (Manado: Polimdo Press, 2019), 11.

b. Kelangsungan Usaha

Entitas mempunyai kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha.

c. Konsep Entitas Bisnis

Entitas bisnis baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. Transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis tersebut, maupun dari transaksi entitas lainnya.

2. Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan SAK EMKM

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang

diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.³⁶

3. Pengakuan dalam Laporan Keuangan SAK EMKM

a. Aset

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonomisnya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonomiknya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

Martani mengungkapkan bahwa “aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi di masa mendatang, maka pengeluaran tersebut tidak dapat diakui sebagai aset, sebaliknya menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi komprehensif”.³⁷

³⁶ Rifda Adila & Gusti Ketut Agung Ulupui, “Implementasi SAK EMKM dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Studi Kasus UMKM Mawar”, *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing*, 2 (2), 2021, 178.

³⁷ Dwi Martani & Sylvia Veronica NPS, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 35.

b. Liabilitas

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

c. Penghasilan

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

d. Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4. Penyajian Laporan Keuangan SAK EMKM

IAI dalam SAK EMKM penyajian wajar dalam laporan keuangan sesuai persyaratan SAK EMKM dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk entitas dimana penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi kriteria pengakuan *asset*, *liabilitas*, penghasilan, dan beban. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir periode pelaporan, termasuk informasi komperatifnya.³⁸

³⁸ Alfina Violita, "Perancangan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Pada Usaha Binatu Joss Laundry di Surabaya", *Skripsi, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya*, 2018, 22.

Ada banyak jenis laporan keuangan yang dikenal antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Namun demikian hanya ada 3 elemen atau laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM meliputi:³⁹

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) lazimnya dikenal sebagai neraca (*balance sheet*). Laporan posisi keuangan atau neraca suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan yaitu komposisi dan jumlah *asset*, *liabilitas*, dan *ekuitas* dari suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu.

Laporan posisi keuangan atau neraca mempunyai bentuk format yaitu bentuk laporan dan bentuk akun. Dalam bentuk laporan, *asset* dilaporkan terlebih dahulu dibagian atas kemudian dibagian bawahnya dilaporkan sebelah kiri sedangkan kewajiban dan *ekuitas* dilaporkan sebelah kanan, kewajiban dilaporkan lebih dahulu baru melaporkan *ekuitasnya*. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1) Aset

Dalam SAK EMKM menerangkan bahwa aset merupakan sumber daya yang dimiliki entitas dengan memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap arus kas entitas. Arus kas tersebut dapat terjadi ketika penggunaan maupun

³⁹ Sri Mangesti Rahayu, *Akuntansi Dasar Sesuai Dengan SAK EMKM* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 6.

pelepasan aset. Beberapa aset memiliki wujud, namun beberapa aset tidak memiliki wujud. Meski demikian wujud aset tidak esensial untuk menentukan keberadaan aset.

2) Liabilitas

Liabilitas merupakan kewajiban entitas untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dibagi menjadi dua yaitu kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum dapat diselesaikan dengan konsekuensi sesuai kontrak atau peraturan perundangan. Sedangkan kewajiban konstruktif terjadi ketika entitas praktik masa lalu dan entitas akan melakukan tanggungjawab tersebut. Penyelesaian kewajiban dapat dilakukan dengan melakukan pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.

3) Ekuitas

Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Pengakuan ekuitas adalah pengakuan atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi kinerja terhadap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya

dalam jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi menyajikan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode.

Dalam laporan laba rugi maka akan mencakup akun-akun sebagai berikut:

1) Pendapatan

Pendapatan diakui ketika mendapatkan hak atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima baik saat sekarang maupun masa yang akan datang. Pencatatan pendapatan guna manfaat ekonomi yang diterima atau masih harus diterima secara bersih.

2) Beban Keuangan

Setelah memberikan jasa kepada entitas, maka entitas mengakui sebagai beban atas imbalan kerja sebesar nilai yang akan dibayar sebagai imbalan jasa tersebut.

3) Beban Pajak

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan tidak memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan pihak yang berkepentingan atau pemakai laporan tersebut, maka dari itu perlu adanya catatan atas laporan keuangan untuk menambahkan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif dan dilaporkan dalam bentuk narasi, selain itu juga dapat menginterpretasikan angka-angka yang terkandung didalam laporan keuangan, maka dari itu pemakai juga perlu melihat catatan atas laporan

keuangan agar dapat memahami asumsiasumsi yang dipakai dalam keseluruhan.

Dalam SAK EMKM catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis dimana setiap akun dalam laporan keuangan menunjukkan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan yang berisikan tambahan memuat:

- 1) Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
- 2) Ikhtisari kebijakan akuntansi
- 3) Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.⁴⁰

E. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam bahasa inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada dasarnya,

⁴⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah* (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2016), 9.

akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁴¹ Menurut peraturan perundang-undangan No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴²

Akuntabel atau akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat.

⁴¹ Rahima Purba & Azima Medina Amrul, “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akunabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 8 (1), 2017, 102.

⁴² B. H. Audia, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan di Desa Sajang Kecamatan Sembalun”, *Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*, 6 (2), 2020, 6.

2. Prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas, perlu diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, yaitu:⁴³

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh pengurus untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan.
- c. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin pengguna sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan.
 - a. Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi dan manfaat yang sudah diperoleh.
 - b. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai peran perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik.
 - d. pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain prinsip-prinsip tersebut, akuntabilitas harus juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini, diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung instansi memberikan akuntabilitasnya, lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan, untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

⁴³ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), 92.

3. Macam-Macam Akuntabilitas

Akuntabilitas terbagi menjadi beberapa macam, menurut Madiasmo membagi Akuntabilitas menjadi dua macam yaitu, sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

b. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja, kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah ke pusat, dan pemerintah pusat ke MPR.⁴⁴

4. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas pada dasarnya adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang harus terjadi. Apabila terjadi suatu kendala, atau penyimpangan, maka penyimpangan dan kendala tersebut harus segera dikoreksi. Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh J.b. Ghartery bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan

⁴⁴ Ervina Rohmatul Nehaya, “Peran Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Koinisasi Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus NU Ranting Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”, (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2022), 13.

pelayanan, yaitu apa, mengapa, siapa, yang mana, ke mana, dan bagaimana suatu poertanggungjawaban dilaksanakan.⁴⁵

Dari tujuan yang telah dikemukaakan diatas, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga bias segera diperbaiki apabila terjadi suatu kesalahan.

5. Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan

Dalam konteks laporan keuangan, akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab entitas untuk menyusun, menyajikan, dan melaporkan informasi keuangan secara transparan, jujur, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan dapat dipercaya oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam konteks akuntabilitas keuangan, hal ini mencakup pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana dengan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Komponen utama akuntabilitas meliputi:⁴⁶

- a. Pelaporan keuangan, yaitu dengan menyediakan laporan yang akurat dan tepat waktu

⁴⁵ Rahima Purba & Azima Medina Amrul, "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akunabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 8 (1), 2017, 103.

⁴⁶ Puspitawati & Effendy, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan", *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 9 (1), 2021, 43.

- b. Audit keuangan yaitu dengan melibatkan pihak ketiga untuk memverifikasi keakuratan catatan keuangan
- c. Kepatuhan terhadap regulasi yaitu dengan memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku.

Untuk mencapai akuntabilitas yang efektif, organisasi perlu menerapkan sistem pembukuan yang tepat, memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan akurat. Selain itu, transparansi dalam pelaporan dan kemudahan akses informasi juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), laporan keuangan yang akuntabel harus memenuhi prinsip dasar akuntansi.⁴⁷ Prinsip akuntansi merupakan suatu pedoman bertindak dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Di Indonesia prinsip tersebut ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yang merupakan satu-satunya badan yang berwenang untuk membuat peraturan dibidang akuntansi. Prinsip akuntansi Indonesia terdiri dari sejumlah aturan yang menjadi pedoman bertindak dalam melaksanakan akuntansi di Indonesia. Yang menjadi konsep dasar dalam akuntansi adalah:⁴⁸

⁴⁷ Siti Avivah & Idang Nurodin, “Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Keakuratan Laporan Keuangan Lembaga Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus Lembaga Terapi Anak Insan Mandiri Kota Sukabumi)”, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 9 (1), 2025, 69.

⁴⁸ Fenty Fauziah, *Pengantar Dasar Akuntansi : Teknik dan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 10.

a. Konsep Kesatuan Usaha (*business entity*)

Perusahaan sebagai badan usaha (*unit entity*) berdiri dan terpisah dari pemilik. Seluruh transaksi yang terjadi dicatat dan diakui sebagai transaksi badan usaha, sehingga pendapatan dalam laporan laba rugi merupakan pendapatan badan usaha. Asumsi ini penting untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan bahwa laba bersih yang diperoleh merupakan laba bersih badan usaha. Misalnya usaha ekspedisi yang dimiliki perorangan akan mencatat aktivitas bisnis, bukan aktivitas aset dan utang pemilik.

b. Konsep Periodisasi (*Periodicity*)

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk hidup terus dalam jangka waktu tidak terbatas (*going concern*), sehingga kinerja perusahaan dapat diketahui bila perusahaan dilikuidasi, yaitu dengan cara membandingkan harta pada saat pendirian dengan harta saat badan usaha dilikuidasi. Untuk tujuan penilaian keberhasilan perusahaan pada periode yang tidak terbatas tersebut dibagi menjadi periode pendek. Pembagian periode yang tidak terbatas menjadi periode yang lebih pendek disebut dengan periodisasi, sehingga laporan laba-rugi harus disajikan berdasarkan periode waktu tertentu misalnya tahunan, semesteran, kuartalan atau bulanan. Sebagian besar perusahaan menentukan periode akuntansi mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Namun dapat pula menetapkan periode akuntansi mulai 1 April dan diakhiri tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Penentuan periode akuntansi

dapat ditentukan oleh manajemen sesuai dengan kepentingan perusahaan yang bersangkutan. Seringkali manajemen ingin segera mengetahui perkembangan perusahaan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Penetapan periode akuntansi akan berpengaruh terhadap laba periodik.

c. Konsep Kelangsungan Usaha (*Continuity of Activity*)

Asumsi kelangsungan usaha menyatakan bahwa perusahaan sebagai entitas didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, artinya pendirian perusahaan dimaksudkan berlaku sepanjang waktu. Dengan asumsi tersebut maka semua harta perusahaan disajikan sebesar nilai perolehannya bukan nilai pasarnya pada tanggal neraca.

d. Konsep Objektivitas

Asumsi objektivitas menyatakan bahwa elemen yang ada pada neraca disusun berdasarkan anggapan tidak rancu (bias) dan disajikan untuk semua golongan pengguna laporan keuangan. Pencatatan dan pelaporan akuntansi harus didasarkan pada data yang objektif, bisa dipercaya sebagai laporan yang menyajikan informasi yang tepat dan berguna. Contoh di dalam pertukaran antara penjual dan pembeli, harga terbaik akan dicapai jika nilai akhir telah disepakati.

e. Konsep Unit Moneter

Konsep unit moneter menyatakan bahwa yang dicatat dan dilaporkan oleh akuntansi hanyalah data transaksi yang dapat dinyatakan dengan uang misalnya Rupiah, Dolar, Ringgit dan lain-lain. Uang adalah alat ukur yang dapat digunakan serta memungkinkan adanya keseragaman dalam pencatatan

dan pelaporan pada transaksi bisnis. Jika suatu transaksi berbeda satuan mata uang dalam penyajian laporan keuangan, maka harus dilakukan konversi mata uang tersebut.